

CERITA DAMPAK PROGRAM SIAP SIAGA

Meningkatkan Ketangguhan: Strategi Desa Adat Tangguh di Bali

Juni 2023

PROGRAM SIAP SIAGA BALI

- Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan Manajemen Risiko Bencana di Indonesia dan keterlibatan Indonesia dan Australia pada manajemen bencana di Kawasan Indo-Pasifik.
- **Fokus dalam negeri** pada penguatan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana.
- **Fokus regional** untuk memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo Pasifik.
- Mendukung **prioritas Pemerintah Indonesia** terkait penanggulangan bencana di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2015-2045.
- Bermitra dengan masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, sejalan dengan **Pendekatan Pentahelix** Pemerintah Indonesia.
- Program SIAP SIAGA menerapkan **pendekatan perubahan sistem untuk meningkatkan koherensi kebijakan dan kejelasan peran dalam sektor penanggulangan bencana** di Indonesia, berdasarkan hasil luas dari investasi sebelumnya di sektor ini selama 15 tahun terakhir.
- Program SIAP SIAGA bekerja erat dengan, dan memfasilitasi, pemangku kepentingan untuk **memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang ada** dan untuk memanfaatkan kegiatan dan program yang sedang berlangsung, jaringan, dan sumber daya, untuk membantu menghubungkan titik-titik di seluruh sistem dengan meningkatkan koordinasi, pembelajaran sejawat, dan kolaborasi.
- Di **Bali**, prioritas pemerintah provinsi difokuskan pada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana, terlepas dari tantangan sistem pemerintahan ganda desa adat dan desa adat, yang merupakan aspek penting ekonomi lokal dan industri pariwisata.

UJI REALITA TATA KELOLA DESA ADAT

Di Bali, desa dikategorikan sebagai desa dinas atau desa adat. Hingga tahun 2023, terdapat 2.212 desa yang terdaftar di Bali, dan 67,5% merupakan desa adat. Desa adat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asal, hak tradisional, kekayaan milik sendiri, tradisi, praktek sosial turun-temurun yang mengikat tempat-tempat suci, tugas dan wewenang serta hak untuk mengatur dan mengurus sendiri. rumah tangga.

Berkaitan dengan ketahanan lokal, menurut Peraturan BNPB No.1 Tahun 2012 tentang Desa Tahan Bencana, BPBD hanya diberi mandat untuk bekerja sama dengan desa administratif. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dukungan yang signifikan terhadap desa-desa di Bali yang berada di luar lingkup peraturan namun tidak kalah rentannya, atau terpengaruh oleh, risiko bencana. Artinya, kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Bali untuk mendukung desa menjadi terbatas.

TANTANGAN PEMBANGUNAN YANG KOMPLEKS

Masyarakat adat seringkali menjadi yang terakhir menerima investasi publik dalam layanan dasar dan infrastruktur serta menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi formal, menikmati akses terhadap keadilan, dan berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Bencana memperburuk kerentanan dan ketidaksetaraan ini. Meskipun Pemprov Bali menyediakan dana pembangunan untuk desa adat, namun masih ada kesenjangan pelayanan, termasuk ketahanan bencana.

LANGKAH KE DEPAN

Para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Bali mengadopsi konsep Destana untuk membangun ketahanan masyarakat di desa adat untuk mendukung inklusi dan kesetaraan. Pemangku kepentingan multi-sektor terlibat dalam diskusi dan desain. SIAP SIAGA mengumpulkan pemangku kepentingan dan memfasilitasi pengembangan strategi, memastikan kejelasan peran, pendekatan inklusif dan keselarasan dengan agenda pemerintah dan konteks kebijakan.

BERBASIS BUKTI PENGEMBANGAN STRATEGI

Pada Juli 2020, SIAP SIAGA menyelenggarakan Lokakarya Pembelajaran (Lessons-Learned Workshop) Penanganan COVID-19 di Bali sebagai langkah awal untuk memahami penanggulangan bencana di desa adat

Temuan 1: Temuan 1:

Pembentukan Gugus Tugas Desa Adat mendukung respons COVID-19 karena didasarkan pada kearifan lokal, dan karena sebagian besar penduduk Bali mengikuti hukum adat, kemungkinan implementasi jangka panjang yang lebih tinggi.

Temuan 2: Pemanfaatan Majelis Adat yang efektif untuk menyebarluaskan data dan informasi serta mendidik masyarakat dapat ditingkatkan.

**Berbasis Pada
Kebijakan
Lokal**

**Kepemimpinan
Lokal**

**Termasuk Aktor
Masyarakat Sipil**

**Pendekatan
Fasilitasi Siap
Siaga**

Temuan 3: Organisasi Masyarakat Sipil perlu dilibatkan, selain aktor Desa Adat, seperti Karang Taruna, untuk tujuan penyadaran, pengambilan keputusan yang inklusif dan pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat.

SIAP SIAGA memfasilitasi lokakarya dan memfokuskan diskusi pada masalah koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan, serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di sektor penanggulangan bencana.

PARTISIPATIF PENGEMBANGAN STRATEGI

Majelis Desa Adat dan BPBD bekerja dengan BPBD memberikan fasilitasi dan dukungan teknis sementara MDA berkoordinasi dengan desa adat untuk dukungan dan partisipasi mereka terutama dalam fase Penilaian Risiko Bencana Partisipatif (PDRA). SIAP SIAGA memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara MDA kabupaten/kota dan BPBD kabupaten/kota, dengan proses PDRA menghasilkan peningkatan hubungan kerja lintas kelompok pemangku kepentingan utama dalam mengatasi risiko bencana di desa adat.

Desember 2020-Maret 2021:

**PDRA di Kabupaten
Karangasem, Kabupaten
Badung, dan Kota Denpasar**

SIAP SIAGA memfasilitasi kemitraan antara BPBD kabupaten/kota dan MDA kabupaten/kota untuk mengidentifikasi profil risiko di desa adat, memastikan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan.

November 2021:

**Lokakarya Konfirmasi
Analisis PDRA**

SIAP SIAGA memberikan bantuan teknis untuk menganalisis hasil PDRA sambil memperkuat komunikasi dan koordinasi antara MDA dan BPBD yang menghasilkan rencana aksi untuk pengembangan strategi.

Mei 2022:

**Lokakarya Penyusunan
Strategi Ketahanan Desa
Adat Berbasis Kesejahteraan**

SIAP SIAGA memfasilitasi koordinasi antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten/kota, instansi pemerintah provinsi terkait, MDA provinsi, dan Forum PRB provinsi. Selama lokakarya ini, disepakati strategi ketahanan berbasis kesejahteraan, memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dan kesenjangan seperti peraturan di tingkat desa adat, kemitraan, peningkatan kapasitas, dll.

Desember 2022:

**Workshop Finalisasi Dokumen
Strategi Ketahanan Desa Adat
Berbasis Kesejahteraan**

SIAP SIAGA memberikan dukungan teknis untuk koordinasi dan pengarusutamaan GEDSI, termasuk pelibatan kelompok rentan dalam proses finalisasi.

“

Setiap jengkal Pulau Bali berpotensi bencana. SIAP SIAGA telah mengambil peran strategis untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan untuk Bali yang lebih tahan bencana.

Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si., Kepala Pelaksana BPBD Bali

”

MENGHUBUNGKAN INFORMASI YANG ADA UNTUK KESELARASAN KEBIJAKAN

KOORDINASI YANG MENINGKAT

BPBD provinsi telah meningkatkan kesadaran akan peran koordinasi dan komunikasi mereka untuk meningkatkan efektivitas pemberian layanan penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat.

PARTISIPATIF DAN INKLUSIF

Klarifikasi fungsi koordinasi BPBD Provinsi telah menambah ruang dan normalisasi partisipasi aktor non-pemerintah (melalui Forum PRB Provinsi) untuk memberikan masukan teknis terhadap strategi dan mendukung pengarusutamaan GEDSI.



KOMUNIKASI YANG MENINGKAT

MDA provinsi dan kabupaten menyadari peran koordinasi mereka untuk memfasilitasi komunikasi antara BPBD dan desa adat untuk meningkatkan penyampaian layanan dan kapasitas untuk penanggulangan bencana.

SESUAI DENGAN PERATURAN NASIONAL

Strategi Desa Adat Tangguh diadopsi berdasarkan Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Destana. Strategi ini sejalan dengan peraturan nasional, mengadopsi 20 indikator dalam peraturan Destana, dan menyajikan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk implementasi strategi (dalam Rencana Aksi, Bab 4 strategi).

APA SELANJUTNYA? Strategi tersebut telah disetujui oleh MDA dan Pedoman Teknis akan dikembangkan untuk pengujian pada tahun 2023. Dokumen final kemudian akan disahkan oleh MDA provinsi.

SEBELUM

Desa adat tidak termasuk dalam program pemerintah desa tangguh bencana.

Tantangan koordinasi antara BPBD (provinsi dan kabupaten) serta struktur desa adat dalam pemberian layanan penanggulangan bencana.

Pemahaman tentang inklusi terbatas pada partisipasi perempuan dan pemuda.

PERAN SIAP SIAGA



PENILAIAN SISTEM



FASILITASI



PENDUKUNG PEMBELAJARAN



BANTUAN TEKNIS STRATEGIS

SESUDAH

Strategi Desa Adat Tangguh dikembangkan, meningkatkan jangkauan program pemerintah desa tangguh dari 32,5% menjadi 100%.

Strategi tersebut memperjelas mekanisme koordinasi dan peran serta tanggung jawab para pelaku utama, termasuk BPBD, MDA, lembaga pemerintah lainnya, dan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Strategi tersebut secara efektif mengarusutamakan isu-isu gender serta inklusi sosial, memberikan praktik yang baik dalam pengarusutamaan GEDSI.



TERIMA KASIH